

JUDUL PENELITIAN :"BALI NDESO MBANGUN DESO" DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Reni Windiani

Abstract

Nowadays food can be categorized as one of the most important aspect of human right. Regarding to that condition, state should provide food accessibility and availability for the society. Due to big number of its population, Indonesia faces complex problem in order to fulfill of food need of its people. In this respect food security policy becoming focuses of Indonesian development policy especially its agriculture development policy. One of the most considerable provinces in Indonesian national agriculture is Central Java, by reason of its 17% contribution on national rice production. Further, in contrast to national food condition that experienced rice import dependency, Central Java's food security currently experiencing steady condition. This condition raised up interesting research question: is there any correlation between central java's steady food condition and Central Java Governor Candidate Bibit-Rusri's Campaign slogan "Bali Ndeso Mbangun Deso" in the Central Java Governor Election on 2008. Using qualitative method and type of descriptive research, this inquiry showed that the moral movement "Bali Ndeso Mbangun Deso" has contributed positively on food security in Central Java.

Key words : food security, bali ndeso mbangun deso, rice production.

A. PENDAHULUAN

Pertimbangan yang menjadi landasan dari dibuatnya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan adalah bahwa pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan Nasional. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan, dan berlaku secara universal. Oleh karenanya ketersediaan dan askesibilitas pangan bagi masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk direalisasikan oleh pemerintah. Adapaun yang dimaksud dengan pangan dalam UU No. 7 tahun 1996 pasal 1 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang serta stagnannya pertumbuhan produktivitas lahan dan tenaga kerja pertanian. (http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/Anjak_2005_IV_15.pdf diakses Kamis 28 april 2011 jam 13.29 WIB.) Kondisi tersebut diperburuk lagi dengan dampak perubahan iklim yang mengakibatkan bencana alam dan ketidakteraturan musim sehingga hasil pertanian menjadi semakin sulit diprediksi. Indonesia yang pernah sukses dengan swasembada beras sekarang ini menjadi negara pengimpor beras. Impor beras dilakukan sebagai salah satu upaya mewujudkan stabilitas penyediaan pangan nasional. Stok beras yang ada pada Perum Bulog sejumlah 1,7 juta ton pada saat ini, tak lain karena ditopang oleh beras impor. Realisasi impor beras Bulog tahun 2010/2011 mencapai 1,9 juta ton. (Kompas, 6 Mei 2011).

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang cukup penting dalam kaitannya dengan ketahanan pangan nasional, karena Provinsi Jateng memiliki andil dan kontribusi yang cukup besar bagi produksi beras secara nasional yaitu sekitar 17 persen. (<http://www.antaranews.com/berita/1268520045/jateng-surplus-2-5-juta-ton-gkg>) diunduh Kamis 28 April 2011 jam 13.14 WIB). Secara geografis, luas wilayah Provinsi Jawa Tengah 3,25 juta hektar atau 1,70 % dari luas Indonesia, yang secara administratif terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota, yang meliputi 573 kecamatan dan 8.577 desa/kelurahan dengan areal lahan sawah 992 ribu

hektar, dan 2,26 juta hektar lahan bukan sawah. Berdasarkan hasil sensus BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 baru lalu, jumlah penduduk Jawa Tengah saat ini sebanyak 32,38 juta jiwa, dimana 65% penduduk Jawa Tengah tersebut tinggal di perdesaan dan mayoritas menjalani karya usaha pada sektor pertanian dalam arti luas, UMKM, dan industri padat karya.

(http://obyektif.com/infojateng/read/dipertanyakan_bali_desobangun_deso/ diakses Kamis 28 April 2011 jam 12.50 WIB.).

Berbeda dengan kondisi pangan nasional yang mengalami ketergantungan pada impor beras, ketahanan pangan di Jawa Tengah saat ini justu dalam kondisi mantap, indikasinya ditandai dengan mayoritas menunjukkan warna hijau tua dan sebagian kecil warna hijau muda, tidak ada sedikitpun warna kuning atau merah. Kuatnya ketahanan pangan Jawa Tengah, antara lain ditunjang oleh produksi beras yang dalam dua tahun terakhir mengalami surplus. Tahun 2009 surplus 2,6 juta ton. Berdasarkan data Angka Ramalan Sementara (ASEM) tahun 2010, produksi beras Jawa Tengah mencapai 10.110.830 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau sama dengan 5.467.521 ton beras, sedangkan kebutuhan beras Jawa Tengah setiap tahun 2.717.711 ton sehingga surplus 2.929.810 ton. Bulan Januari sampai Maret 2011, Jawa Tengah panen raya, diprediksi dalam 3 (tiga) bulan tersebut surplus beras 1,5 juta ton, sehingga target nasional agar Jawa Tengah bisa produksi 10,43 juta ton tahun 2011 dapat terpenuhi, bahkan surplus bias meningkat, sehingga ketahanan pangan Jawa Tengah semakin meningkat. Surplus beras Jawa Tengah tahun 2009 dan 2010, mampu memberi kontribusi untuk menopang ketahanan pangan nasional sebesar 15,30% sampai 16%. Komoditas pangan lainnya yang juga surplus, adalah Jagung tahun 2010 surplus 2,8 juta ton, ubi kayu surplus sebanyak 3 juta ton lebih. Produksi daging surplus 100 ribu ton lebih, telur surplus 18 ribu ton lebih, dan susu surplus sebanyak 38 ribu ton lebih. Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2009 sebesar 100,03 di atas angka Nasional 98,58. Tahun 2010 NTP meningkat menjadi 103,12 (atau naik 3,09). Pada bulan Agustus 2011 NTP Jateng diprediksi 102,65. Pertumbuhan ekonomi: Kondisi surplus berbagai komoditas pangan, menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Tahun 2009, pertumbuhan ekonomi Jateng sebesar 4,70% masih di atas rata-rata nasional

4,50%. Tahun 2010 meningkat menjadi 5,80% atau naik 0,9%. Diprediksi oleh Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Jateng 2011 mencapai 6,25%.

(http://obyektif.com/infojateng/read/dipertanyakan_bali_desobangun_deso/ diakses Kamis 28 April 2011 jam 12.50. WIB.).

Kondisi tersebut di atas, menimbulkan rasa keingintahuan peneliti tentang adakah keterkaitan antara kemampuan kondisi pangan di Jawa Tengah dengan konsep “Bali Ndeso Mbangun Ndeso”? Serta Faktor – faktor apakah yang mempengaruhi ketahanan pangan di Jawa Tengah? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara gerakan moral “Bali Ndeso Mbangun Deso” dengan kemampuan kondisi ketahanan pangan di Jawa Tengah , serta untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan di Jawa Tengah.

A.1. Tinjauan Pustaka

A.1.a. Ketahanan Pangan

Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996 pasal 17 memberikan definisi ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Secara umum kebijakan ketahanan pangan nasional yang dirumuskan adalah terkait dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pangan tahun 1996 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah No 68 tahun 2001. Kebijakan yang dirumuskan diselaraskan dengan isu global yang disepakati dalam Pertemuan Puncak Pangan Dunia tahun 2002 (*World Food Summit- five years later : WFS - fyl*) yaitu mencapai ketahanan pangan bagi setiap orang dan mengikis kelaparan di seluruh dunia. Untuk melaksanakan tugas tersebut, diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 132 Tahun 2001 tanggal 31 Desember tentang Dewan Ketahanan Pangan (DKP). Tugas DKP sesuai Keppres adalah (1) merumuskan kebijakan di bidang ketahanan pangan nasional yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi serta mutu, gizi, dan keamanan pangan; dan (2) melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan nasional.

Beberapa kebijakan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan upaya mewujudkan stabilitas (ketersediaan) pangan nasional adalah (1) kebijakan dan strategi diversifikasi pangan di Indonesia serta program aksi diversifikasi pangan, (2) di bidang perberasan: kebijakan harga dasar pembelian pemerintah (HDPP) dan tarif impor, (3) kemandirian pangan, dan (4) kebijakan (pangan) transgenik.

(Achmad Suryana: http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/Anjak_2005_IV_15.pdf diakses Kamis 28 april 2011 jam 13.29 WIB.) Gubernur Jawa Tengah Babit Waluyo melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 147 tahun 2008 telah menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 54 tahun 2007 tentang Pembentukan DKP Provinsi Jawa Tengah, dianggap sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu disesuaikan kembali. Hal ini sejalan dengan 9 arahan Presiden RI sekaligus menjabat sebagai Ketua DKP Nasional, yang salah satunya mengarahkan agar melaksanakan Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) secara sungguh-sungguh diseluruh Indonesia dan untuk mencapai keberhasilan diperlukan keterpaduan lintas sektor dan peran serta daerah. Dalam Peraturan

Gubernur Jawa Tengah nomor 147 tahun 2008 berisi tentang beberapa point terkait Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan di Provinsi Jawa Tengah. Pada bab IV pasal 5 point 1 tertulis DKP mempunyai tugas membantu Gubernur dalam (a) merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Provinsi dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Ketahanan Pangan Republik Indonesia; (b) merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah; (c) melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pada point ke-2 tugas DKP meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman pangan, serta pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Dalam susunan organisasi Dewan Ketahanan Pangan tingkat Provinsi terdiri dari ketua, sekretaris sekaligus merangkap Ketua Harian, kemudian anggota. Pada Provinsi Jawa tengah Ketua DKP dijabat oleh Gubernur Jawa Tengah, kemudian sekretaris yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Harian dijabat oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Dewan ketahanan pangan provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Provinsi dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Provinsi, kemudian merumuskan kebijakkan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan serta melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan provinsi yang keseluruhannya tertulis jelas dalam Peraturan Presiden No. 83 tahun 2006 tentang tugas Dewan Ketahanan Pangan. (http://www.jatengprov.go.id/?document_srl=9146 diakses Kamis 28 April 2011 jam 13.17 WIB.)

Adapun visi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah :Menjadi Lembaga yang Handal dan Profesional dalam Memantapkan Ketahanan Pangan Masyarakat yang Berbasis Sumber daya Lokal Jawa Tengah Menuju Kesejahteraan Masyarakat Jawa Tengah. Sedangkan Misinya adalah :

- a) Menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan dalam ketersediaan, cadangan dan distribusi pangan.
- b) Menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan teknis dalam meningkatkan kewaspadaan dan panganekaragaman konsumsi pangan.
- c) Menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan agribisnis pangan.
- d) Menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan teknologi pangan dan permodalan.
- e) Menyelenggarakan fasilitasi dan perencanaan, monitoring dan evaluasi ketahanan pangan.
- f) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan peranan penyuluhan serta kelembagaan dalam pemantapan ketahanan pangan.
- g) Melaksanakan koordinasi dalam pemantapan ketahanan pangan. (<http://bkp.jatengprov.go.id/index.php?action=home.main> diakses Kamis 28 April 2011 jam 13.23 WIB.)

A.1.b. Bali Ndeso Mbangun Deso

“Bali Deso Bangun Deso” bukanlah program, tetapi gerakan moral untuk memberdayakan masyarakat desa agar mampu mengelola potensi sumber daya

pembangunan yang tersedia sangat melimpah di perdesaan. Tujuannya, agar pembangunan pedesaan menjadi maju dan kesejahteraan masyarakatnya meningkat.

Gerakan moral dimaksud, adalah: yang sudah pintar menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kembali ke desa memberitahu atau *ngajari* masyarakat desa yang belum *pinter* supaya *pinter* mengelola potensi desanya dalam kegiatan pembangunan di segala sektor, sehingga desanya menjadi maju. Demikian pula bagi yang sudah kaya dan berkelebihan harta, juga jangan segan-segan membantu saudara kita di desa melalui hibah dana, modal usaha, dan pendampingan manajemen usaha, agar geliat ekonomi kerakyatan di desa semakin tumbuh, sehingga kesejahteraannya meningkat.

(http://obyektif.com/infojateng/read/dipertanyakan_bali_desobangun_deso/ diakses Kamis 28 April 2011 jam 12.50. WIB.).

A.1.c. Manajemen

Istilah manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *management*, yang terbentuk dari kata *manus* yang artinya tangan. Kata *manus* itu sendiri berkaitan dengan istilah *manage* yang berasal dari bahasa Latin *mansionaticum* yang berarti pengelolaan rumah besar. Ndraha (2003).

Sheldon (1930) mendefinisikan manajemen sebagai berikut : “*management proper is the function in industry concered in the execution of policy, within the limits set by administration, in the employment of the organization for the particular objects set before it*”. Sheldon mendefinisikan manajemen dari sudut pandang industri, yaitu bahwa manajemen didefinisikannya sebagai kajian terhadap pelaksanaan kebijakan. Kajian itu sendiri dipandang dalam batas – batas kumpulan penyelenggaraan dan pekerjaan organisasi untuk tujuan khusus yang akan datang.

Terry (1972) mendefinisikan manajemen sebagai : “*distinct process consisting of planning, organizing, actuating and cotrolling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources*”. Dari pendapatnya itu Terry menekankan bahwa manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari 4 (empat) aktivitas yaitu : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.

Menurut Millet (1954) manajemen adalah : “*management is the process directing and facilitating the work of people organized in formal group to achieve a desired end*”. Berdasarkan pengertian ini dapat dikatakan bahwa Millet memandang manajemen dari sudut pandang organisasi yang berkecimpung dalam suatu pekerjaan. Manajemen menurut Millet adalah suatu proses kepemimpinan dan pemberian arah terhadap pekerjaan yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Menurut Tead (1951) manajemen diartikan sebagai berikut : “*management is the process and agency which direct and guides the operations of an organization in the realizing of established aims*”. Hal ini berarti bahwa manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan beberapa pengertian manajemen tersebut di atas, dapat ditarik gambaran umum tentang manajemen, yaitu suatu rangkaian proses yang mengarah kepada perwujudan suatu tujuan tertentu. Dalam proses tersebut, terkandung

sejumlah unsur – unsur yang masing – masing unsur tersebut sub – sub bagian dari manajemen itu sendiri. Dalam kaitannya dengan organisasi swasta maupun pemerintahan, unsur – unsur yang terkandung dalam proses manajemen antara lain berupa :

- a. Komunikasi, yaitu keberadaan tata hubungan, baik yang timbal balik maupun yang searah, antara atasan dan bawahan ;
- b. Tata usaha, yaitu keberadaan pengaturan dan pengurusan surat – surat, meliputi pengiriman, penerimaan maupun pengarsipan;
- c. Perbekalan, yaitu keberadaan pengaturan dan pengurusan barang – barang yang meliputi pemesanan, pengadaan, penyimpanan, penghapusan, pengiriman dan pemakaian;
- d. Keuangan, yaitu keberadaan dan pengaturan pengurusan uang, meliputi pendanaan, pembiayaan, pembelanjaan, pemasukan maupun utang – piutang lainnya;
- e. Kepegawaian, yaitu keberadaan pengaturan dan pengurusan personalia yang meliputi pemindahan, pemberhentian, pengangkatan maupun pemberian hadiah dan sanksi;
- f. Kepemimpinan, yaitu keberadaan pengaturan dan pengurusan seluruh pengarahan dan pengomandoan organisasi.

Agar suatu manajemen dapat dilakukan dengan tertib, efektif, dan efisien, dibuatlah pembagian dan pengelompokan/klasifikasi pekerjaan. Pertimbangan klasifikasi tersebut sangat relatif, tergantung pada jenis dan tipe organisasi, kemampuan sumber daya organisasi, dan sasaran yang hendak dicapai. Karena itu, beberapa ahli manajemen mengklasifikasikan fungsi manajemen tersebut berdasarkan sudut pandang yang bermacam-macam, namun dalam satu prinsip manajemen yang sama yaitu untuk mencapai ketertiban, keefektifan dan efisiensi. Adapun fungsi – fungsi manajemen tersebut antara lain :

- a. Menurut Farlan (1959) : *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), dan *controlling* (pengawasan), atau yang disingkat dengan akronim POCO;
- b. Menurut Newman (1963) : *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *assembling resources* (pengumpulan sumber daya), *supervising* (pengendalian kerja) dan *controlling* (pengawasan) atau yang disingkat dengan akronim POASCO;
- c. Menurut Koontz dan O'Donnell (1968) ; *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *staffing* (penyusunan pegawai), *directing* (pengarahan kerja) dan *controlling* (pengawasan) atau yang disingkat dengan akronim POSDICO;
- d. Menurut Gullick (1937) : *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *staffing* (penyusunan pegawai), *directing* (pengarahan kerja), *coordinating* (pengkoordinasian), *reporting* (pelaporan) dan *budgeting* (anggaran) atau yang disingkat dengan akronim POSDCORB;
- e. Menurut Terry (1961) : *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan) dan *controlling* (pengawasan); atau yang disingkat dengan akronim POAC;
- f. Menurut Gibson et.al. (1982) : *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), dan *controlling* (pengawasan) atau yang disingkat

dengan akronim POC.

Untuk mencapai suatu sistem nilai yang disebut efektivitas, efisiensi, dan produktivitas, fungsi – fungsi manajemen seperti tersebut di atas perlu dioperasikan secara terus menerus dan berturut- turut. Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah fungsi – fungsi manajemen tersebut diaplikasikan dalam gerakan moral “Bali Ndeso Mbangun Ndeso”.

A.2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatatif, yaitu jenis penelitian dimana temuan – temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik ataupun bentuk hitungan lainnya. (Strauss & Corbin, 2003:4). Dalam penelitian kualitatif pendekatan yang digunakan bersifat induktif yaitu mengkaji sesuatu dari hal yang bersifat khusus ke hal – hal yang bersifat umum (Babbie, 1993:44). Adapun tipe penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Menurut Whitney, penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk mendapatkan deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan-hubungan antar fenomena yang diselidiki, (Nazir; 1988:34). Penelitian ini akan berusaha untuk mendeskripsikan secara sistematis dan akurat mengenai gerakan moral “Bali Ndeso Mbangun Deso” dengan kondisi ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan informan yang berkaitan dengan topik penelitian, dan dokumentasi, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data tertulis, terutama yang berupa arsip – arsip, dukumen resmi, buku – buku, maupun data – data statistik yang berhubungan dengan penelitian.

Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi : Data Primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan terpilih, serta Data Sekunder, yang diperoleh dari buku – buku, laporan, dokumen – dokumen, jurnal, koran, majalah, dan internet. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Triangulasi. Dalam penelitian ini triangulasi akan dilakukan atas dasar sumber data yaitu dengan memeriksa kembali data yang telah diperoleh pada kesempatan lain, membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen yang terkait, serta membandingkan data dari narasumber tertentu dengan narasumber lain.

Reduksi data, display data, verifikasi data, kemudian penarikan kesimpulan, merupakan teknis yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini. Meski demikian, proses analisis tidak menjadi kaku oleh batasan – batasan kronologis tersebut. Komponen – komponen analisis data yang mencakup reduksi data, display data, dan verifikasi data serta pembuatan kesimpulan, secara interaktif saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data.

A.3. Hasil Penelitian

A.3.a. Potensi Lahan Pertanian :

Jenis tanah wilayah Jawa Tengah di dominasi oleh tanah latosol, alluvial dan grumusol, sehingga hamparan tanah termasuk tanah yang mempunyai tingkat kesuburan yang relatif subur. Luas lahan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 3.254.412 Ha, terbagi atas lahan sawah seluas 991.652 Ha dan bukan sawah seluas 2.262.760 Ha yang terdiri dari bangunan/pekarangan, tegalan/kebun, ladang/huma, padang rumput, hutan negara, hutan rakyat, perkebunan negara, rawa, tambak, kolam/empang, lahan kering yang sementara tidak diusahakan, dan lain-lain. Penggunaan lahan selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 1
Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2007- 2009

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)		
		2007	2008	2009
1	Lahan Sawah	990.824	990.652	991.652
2	Bukan Lahan Sawah	2.263.588	2.263.760	2.262.760
	- Bangunan/Pekarangan	521.769	524.465	503.923
	- Tegal/Kebun	737.677	732.853	730.370
	- Ladang/Huma	10.341	13.346	13.413
	- Padang Rumput	1.906	1.231	1.184
	- Hutan Rakyat	94.090	95.550	103.402
	- Hutan Negara	568.305	568.572	578.107
	- Perkebunan Negara	75.865	71.868	69.345
	- Rawa	8.201	9.027	9.035
	- Tambak	33.050	34.972	39.810
	- Kolam/Empang	6.328	3.719	8.259
	- Lahan kering yang sementara tidak diusahakan	1.819	1.772	1.628
	- Lain-lain	204.237	206.385	204.284
	Jumlah (Ha)	3.254.412	3.254.412	3.254.412

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, BPS, (2007 – 2010)

Menurut penggunaannya, persentase lahan sawah yang berpengairan teknis adalah 38,65%, tada hujan 28,49% dan lainnya berpengairan setengah teknis. Dengan menggunakan teknik irigasi yang baik, potensi lahan sawah yang dapat ditanami padi lebih dari dua kali sebesar 74,64 persen.

A.2.b. Badan Ketahanan Pangan (BKP) Jawa Tengah.

Badan Ketahanan Pangan (BKP) memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

Ketahanan Pangan. Badan Ketahanan Pangan (BKP) mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan;
- c) pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup provinsi dan kabupaten / kota;
- d) pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
- e) pelaksanaan kesekretariatan badan;
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. (BKP Jawa Tengah 2011)

Bagan 1
Struktur Organisasi
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah



Sumber : BKP Jateng 2011.

Kelembagaan ketahanan pangan tingkat Kabupaten/Kota semakin berkembang di Jawa Tengah. Kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan sebagai aspek non-teknis, merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan ketahanan pangan. Kelembagaan ketahanan pangan tingkat kabupaten/kota sudah terbentuk di 35 Kab/Kota se-Jawa Tengah sebagai Unit Kerja Daerah. Selain itu setiap Kab/Kota juga telah membentuk DKP sebagai lembaga koordinatif dalam penanganan ketahanan pangan di daerahnya. Perkembangan kelembagaan ketahanan pangan Kab/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2010 adalah sebagai berikut.

Tabel 2
Perkembangan Kelembagaan Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah

No	Kelembagaan	2009	2010
1	Badan Ketahanan Pangan	2	2
2	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	3	5
3	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan	1	2
4	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan	1	2
4	Badan Pemberdayaan Masyarakat, KB dan Ketahanan Pangan (UPTB Ketahanan Pangan)	1	1
5	Badan Pemberdayaan Masyarakat, KB dan Ketahanan Pangan (Bidang Pemberdayaan Masyarakat & ketahanan Pangan)	1	1
6	Kantor Ketahanan Pangan	26	22
Jumlah		35	35

Sumber : BKP Jateng (2009 – 2010)

Peningkatan jumlah kelembagaan ketahanan pangan menjadi Badan (Eselon II) menunjukkan adanya pengakuan unit kerja ketahanan pangan di daerah. Hal ini merupakan salah satu faktor pendorong dalam kegiatan koordinasi kegiatan ketahanan pangan secara luas.

A.2.c. Kontribusi Program Bali Ndeso Mbangun Desa Terhadap Ketahanan Pangan di Provinsi jawa Tengah.

Motto/slogan Bali Ndeso Mbangun Deso kemudian diwujudkan dalam Visi pembangunan Jawa Tengah tahun 2008-2013 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera”, serta dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah 2008 – 2013. Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta sikap responsif aparatur;
2. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri padat karya;
3. Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasiskan kearifan lokal;
4. Pengembangan sumberdaya manusia berbasis kompetensi secara berkelanjutan;
5. Peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur;
6. Mewujudkan kondisi aman dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat. (Bibit Waluyo: 2010 : 23).

Dari enam misi tersebut di atas, misi ke dua yaitu Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri padat karya memperoleh prioritas yang lebih dari yang lain sebagaimana

dikemukakan oleh Bapak H.Soenarno, Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

... sebenarnya berkaitan dengan ketahanan pangan di Jawa Tengah sejak jaman pak Mardiyanto sudah ada progres... Cuma dengan pak Bibit lebih difokuskan yaitu pada misi nomor dua yang sangat relevan dengan upaya peningkatan ketahanan pangan di Jawa Tengah... (hasil wawancara Kamis, 15 September 2011, pkl. 8.45.WIB, lokasi: kantor BKP Jateng).

Prioritas pada misi nomor dua tersebut juga tampak pada peningkatan alokasi anggaran APBD pada program dan anggaran pembangunan Jawa Tengah untuk mendukung Ketahanan Pangan, sebagaimana terlihat pada tabel 4 berikut ini :

Tabel 4
Program dan Anggaran Pembangunan Jawa Tengah untuk Mendukung Ketahanan Pangan

no	SKPD	Program	Tahun		
			2008	2009	2010
1	Dinas Koperasi & UMKM	a. Peningkatan kualitas hidup perempuan b. Pengembangan usaha mikro koperasi & UMKM yg berorientasi IPTEK c. Pengembangan usaha kecil mikro koperasi & UMKM berorientasi pada komoditas unggulan daerah d. Penguatan & pengembangan diversifikasi usaha & sistem distribusi KUMKM e. Pengembangan diversifikasi usaha & peningkatan daya saing	732.998.000 1.003.885.000 1.291.135.000 12.604.933.000		

					3.845.563.000
2	Dinas Perindustrian & Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas b. hidup perempuan c. Perluasan& penguatan pendukung UKM d. e. Perluasan & penguatan lembaga pendukung UKM industri & perdaganmgan f. Pengembangan industri kecil & menengah g. Pemberdayaan usaha dagang kecil & menengah h. Pengembangan sentra/klaster industri potensial i. Peningkatan SDM, pelatihan & bantuan peralatan industri 	653.128.000 1.032.067.000 4.470.000.000 4.921.000.000 2.910.000.000 550.000.000 1.080.000.000 1.470.000.000		
3	Badan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Ketahan Pangan b. Pengembangan Diversifikasi & Pola Konsumsi Pangan c. Peningkatan Mutu & Keamanan Pangan d. Pengembangan Agribisnis e. Peningkatan Kesejahteraan Petani 	2.981.584.000 4.207.000.000 1.633.256.000 830.146.000 830.146.000	5.757.622.000 1.633.256.000 830.146.000	

		f. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan g. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	2.510.216.000 1.739.000.000	750.000.000 3.400.000.000	6.33.822.000 725.336.000 94.162.000 827.621.000
4	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Holtikultura	a. Peningkatan Ketahan Pangan b. Pengembangan Agribisnis c. Peningkatan kesejahteraan petani d. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan e. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan f. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	9.046.629.000 5.337.291.000 400.000.000 600.000.000 1.887.920.000 4.149.200.000	14.687.500.000 11.000.800.000 493.700.000	24.478.779.000 7.642.389.000 371.300.000
5	Dinas Perkebunan	a. Peningkatan Ketahan Pangan b. Pengembangan Agribisnis c. Peningkatan kesejahteraan petani d. Peningkatan pemasaran hasil pertanian/perkebunan e. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	2.400.000.000 4.322.000.000 500.000.000	2.075.364.000 14.500.000.000 250.000.000	2.075.364.000 16.521.941.000 1.367.499.000

			4.500.542.000		
			1.300.000.000		
6	Dinas Peternakan	a. Peningkatan Ketahanan Pangan b. Pengembangan agribisnis c. Peningkatan kesejahteraan petani d. Pencegahan & penanggulangan penyakit ternak e. Peningkatan produksi hasil peternakan f. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	4.165.635.000 6.331.165.000 2.210.000.000 7.646.800.000 200.000.000	12.085.728.000 14.063.950.000 980.000.000 1.248.719.000	5.860.826.000 14.063.950.000 1.248.719.000
7	Set Bakorluh	a. Peningkatan kesejahteraan petani b. Pengembangan agribisnis c. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	700.000.000	4.335.000.0000	6.328.825.000 400.000.000
8	Dinas Kehutanan	a. Optimalisasi Pemanfaatan hutan & hasil hutan b. Rehabilitas hutan & lahan Keg. Bantuan bibit tanaman kehutanan & PPKAN c. Pengelolaan & pemanfaatan hutan d. Pemberdayaan	840.000.000 1.685.000.000	1.346.608.000	1.092.191.000

		masyarakat sekitar hutan		2.503.711.000	
					1.132.833.000
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	a. Pengembangan Agribisnis b. Penguatan & pengembangan perikanan tangkap c. Pembangunan & pengembangan perikanan budidaya d. Inventarisasi & evaluasi sumber daya kelautan e. Pengendalian eksplorasi & eksplotasi sumber daya kelautan f. Pengembangan usaha perikanan laut g. Peningkatan sistem pengawasan bidang kelautan h. Pengembangan riset & teknologi kelautan i. Pemberdayaan SDM & kelembagaan bidang kelautan j. Pemberdayaan masyarakat pesisir k. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan & pengendalian sumberdaya kelautan & perikanan l. Optimalisasi pengelolaan & pemasaran produksi perikanan m. Rehabilitasi & konservasi sumber daya kelautan & perikanan	5.531.000.000 3.881.340.000 6.087.550.000 400.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 150.000.000 90.000.000	4.298.520.000 6.763.875.000 8.300.000.000 5.706.499.000	4.711.628.000

			100.000.000		364.666.000
					273.500.000
					3.497.916.000
					515.833.000
10	Biro Bina Produksi	a. Peningkatan Ketahanan Pangan b. Pengembangan Agribisnis c. Peningkatan kesejahteraan petani d. Pengembangan perikanan tangkap e. Pengembangan perikanan budidaya		750.000.000 2.100.000.000 100.000.000 100.000.000	255.000.000 1.071.123.000 2.450.000.000 100.000.000 100.000.000
11	Biro Perekonomian	a. Penguatan & pengembangan diversifikasi usaha & sistem distribusi KUMKM b. Pengembangan diversifikasi usaha & peningkatan daya saing c. Pengembangan industri kecil & menengah d. Pengembangan		430.000.000	182.333.000

		sentra/klaster industri potensial			
					182.333.000
					273.500.000
12	Dinas PSDA	a. Pengembangan & pengelolaan jaringan irigasi, rawa & jaringan pengairan lainnya b. Penyediaan & pengelolaan air baku	24.572.890.000 2.438.291.000	20.887.741.000 2.510.000.000	35.083.147.000 5.774.215.000
	JUMLAH		118.487.266.000	152.908.832.000	169.812.662.000
	TOTAL ANGGARAN		3.891.791.453.000	5.692.612.376.000	6.263.446.469.000

Sumber :Perda Provinsi Jawa Tengah No.4 th.2009 tentang RPJM Provinsi Jawa Tengah.

Prioritas pada misi nomor dua tersebut juga tampak pada peningkatan alokasi anggaran APBD pada program dan anggaran pembangunan Jawa Tengah untuk mendukung Ketahanan Pangan. Peningkatan ketahanan pangan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan tercermin dengan tersedianya pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, merata dan terjangkau bagi setiap rumah tangga. Dalam kerangka sistem Ketahanan Pangan mencakup 4 (empat) subsistem, yaitu:

1. Ketersediaan Pangan, artinya pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya, serta aman;
2. Distribusi Pangan, bahwa pasokan pangan dapat menjangkau ke seluruh wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga;
3. Konsumsi Pangan, yaitu setiap rumah tangga bisa mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi sesuai kaidah gizi, kesehatan, dan preferensinya;
4. Keamanan Pangan, yaitu bahwa setiap pangan (segar dan olahan) yang beredar dan dikonsumsi masyarakat terjamin mutu dan keamanan melalui proses pengolahan yang higienis dan tidak terdapat kandungan bahan berbahaya, baik berupa bahan tambahan makanan maupun bahan pengawet. (hasil wawancara dengan bapak H. Soenarno, Kamis, 15 September 2011, pkl. 8.45.WIB, lokasi: kantor BKP Jateng).

Dalam mengimplementasikan gerakan moral Bali Ndeso Mbangun Deso yang dituangkan dalam visi dan misi pembangunan Jawa tengah 2008-2013, ada tiga tahapan yang ditempuh yaitu :

1. Tahap Konsolidasi dan Persiapan (2008-2009).

Pada tahap ini dilaksanakan :

- a. Penyusunan konsep "Bali Ndeso Mbangun Deso"
 - b. Penyusunan Prioritas Pembangunan mencakup :
 1. Pertanian dalam arti luas
 2. Koperasi dan UMKM
 3. Pelayanan Dasar Masyarakat
 - c. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 dilanjutkan dengan penjabaran dalam bentuk Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Tahap Percepatan Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemanfaatan Sumberdaya secara Lestari, dan Pelayanan Prima dalam E-Government (2010-2011). Pada tahap ini dilakukan percepatan pelaksanaan program-program prioritas dan pendukung yang telah ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi kinerja program dua tahun sebelumnya, untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera.
 3. Tahap Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Berkemampuan dan Berdayasaing Tinggi (2012-2013). tahap ini merupakan perwujudan capaian tahap terakhir dari visi yang telah ditetapkan, dilakukan pula akselerasi untuk program-program yang capaiannya belum optimal menuju masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera. (Waluyo:2010:28).

B. PEMBAHASAN

Dengan pertanian sebagai *leading sector* sampai dengan saat ini kondisi ketahanan pangan di Jawa Tengah semakin meningkat dan lebih baik. Beberapa kondisi yang dapat menjadi indikator keberhasilan antara lain dapat dilihat pada:

B.1. Kondisi Kerawanan Pangan di Jawa Tengah.

Kerawanan pangan wilayah adalah kondisi dimana pada wilayah tersebut sebagian rumah tangga penduduknya tidak dapat memenuhi 70% kecukupan energi dan protein untuk pertumbuhan fisiologis normal. Wilayah yang berkecukupan pangan mempunyai potensi rumah tangga penduduknya rawan pangan. Istilah kerawanan pangan tidak berarti terjadi kekurangan pangan dalam wilayah itu.

Pemetaan kerawanan pangan tahun 2008 dilaksanakan dengan menggunakan 10 indikator kerawanan pangan kronis dan 4 indikator kerawanan pangan transien dari Departemen Pertanian dan WFP. Indikator tersebut dibagi dalam 3 dimensi yaitu; Dimensi ketersediaan pangan 30% (terdiri dari; beras, jagung, ketela pohon, dan umbi), Dimensi akses pangan 35% (terdiri dari: jumlah persentase penduduk miskin, persentase akses terhadap listrik, akses jalan yang memadai) serta Dimensi penyerapan pangan 35% (terdiri dari; jumlah perempuan buta huruf, persentase berat badan balita dibawah standar, persentase angka kematian bayi, umur harapan hidup, akses ke air bersih, persentase fasilitas kesehatan).

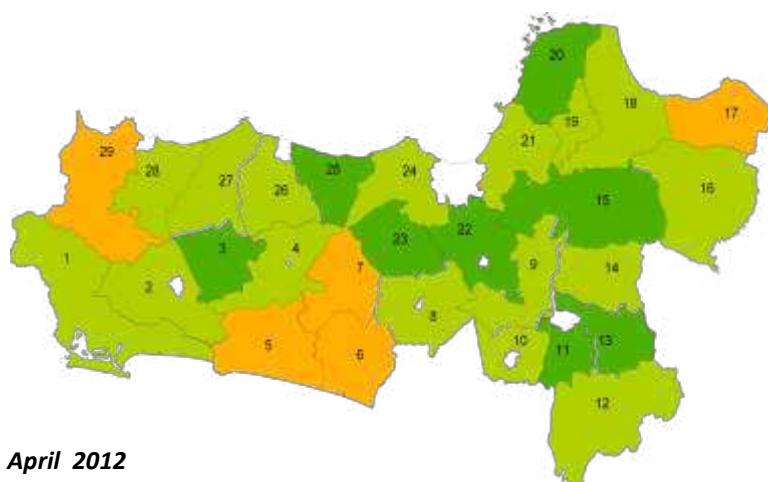
Pemetaan dari dimensi ketersediaan pangan (beras, jagung) menunjukkan bahwa tingkat kerawanan pangan sangat rendah dan digambarkan dengan warna hijau tua. Hasil analisis kerawanan pangan dari dimensi akses pangan yang terdiri dari persentase penduduk miskin, persentase rumah tangga yang tidak dapat mengakses listrik dan akses jalan yang memadai menunjukkan bahwa di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan yang tinggi terdapat di 9 Kabupaten, cukup tinggi di 11 Kabupaten, cukup rendah di 5 Kabupaten, rendah di 1 Kabupaten dan sangat rendah di 1 Kabupaten.

Dari dimensi penyerapan pangan persentase perempuan buta huruf cukup tinggi hanya terdapat di 2 Kabupaten, penyebab kerawanan pangan karena kurangnya fasilitas kesehatan cukup tinggi hanya terdapat di satu Kabupaten.

Dari hasil pemetaan kerawanan pangan secara komposit di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 terdapat 5 (lima) Kabupaten dengan kerawanan pangan cukup tinggi yaitu di Kabupaten Brebes, Rembang, Wonosobo, Purworejo dan Kebumen. Kerawanan pangan cukup rendah terjadi di 16 Kabupaten (Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Kendal, Magelang, Klaten, Boyolali, Sragen, Wonogiri, Demak, Kudus, Pati, dan Blora), sedang tingkat kerawanan pangan rendah terdapat di 8 Kabupaten (Jepara, Grobogan, Karanganyar, Sukoharjo, Semarang, Temanggung, Batang dan Purbalingga).

Penyebab utama terjadinya kerawanan pangan di Jawa Tengah adalah persentase penduduk miskin, persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap listrik serta akses jalan yang memadai. Dengan demikian kerawanan pangan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah bukan disebabkan ketersediaan pangan yang tidak memadai.

Gambar 1
Peta Kerawanan Pangan Jawa Tengah
Tahun 2008



Hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security & Vulnerability Atlas* (FSVA) Jawa Tengah 2009 menunjukkan situasi ketahanan pangan di Jawa Tengah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Jawa Tengah memiliki 5 Kabupaten (Banjarnegara, Blora, Pekalongan, Pemalang dan Brebes) masuk prioritas 5 (tahan pangan/warna hijau), dan 24 Kabupaten masuk prioritas 6 (Sangat Tahan Pangan/warna hijau tua). Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah relatif masih lebih baik karena tidak ada kabupaten masuk pada prioritas 1, 2 dan 3 (kerentanan pangan/warna merah).

Gambar 2
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009



Hasil penyusunan data base peta ketahanan dan kerentanan pangan Jawa Tengah tahun 2010 secara umum kondisi ketahanan dan kerentanan pangan Jawa Tengah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari 28 kabupaten sangat tahan pangan (hijau tua) dan 1 kabupaten (Brebes) dalam kondisi tahan pangan yang di dalam peta ditandai berwarna hijau muda. Empat kabupaten yang tahun 2009 berstatus hijau muda telah meningkat menjadi hijau tua yaitu kabupaten Pekalongan, Pemalang, Blora dan Banjarnegara.

Gambar 3
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Jawa Tengah Tahun 2010 versi *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA)
2010



Peta Ketahanan Pangan Jawa Tengah tahun 2010, hanya menunjukan 2 (dua) warna, yaitu mayoritas warna hijau tua di 28 Kabupaten/kota yang berarti sangat tahan dan warna hijau muda di 1 Kabupaten yaitu Kabupaten Brebes yang berarti tahan pangan. Perkembangan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Jawa Tengah Tahun 2008 - 2010 menunjukkan adanya peningkatan kondisi ketahanan pangan di Jawa Tengah.

B.2. Meningkatnya Produksi Beras

Kuatnya ketahanan pangan Jawa Tengah, antara lain ditopang dari hasil produksi beras yang terus meningkat dan mengalami surplus dari tahun ke tahun. Tahun 2009, surplus beras Jawa Tengah mencapai 2,6 juta ton dan tahun 2010 surplus beras meningkat menjadi 2,9 juta ton. Bahkan Provinsi Jawa Tengah mampu memberi kontribusi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sebesar 16%. Pada bulan Januari sampai dengan Mei 2011, dari hasil kompilasi laporan Kabupaten/kota se-Jawa Tengah menunjukan, bahwa surplus beras mencapai 2,3 juta ton. TAHUN 2011, direncanakan dicapai surplus beras sebanyak 3,1 juta ton. Di samping itu, penyediaan beras bagi rakyat miskin (Raskin) dan cadangan masyarakat yang dikelola oleh Bulog maqsih cukup. Disusul pada akhir Juni sampai Juli 2011 sudah panen raya sehingga beras di Jawa Tengah melimpah. (Suara Merdeka, Selasa 23 Agustus 2011).

Data di atas menunjukkan bahwa motto Bali Ndeso Mbangun Deso telah memberikan kontribusi yang positif terhadap ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah. Selain data tersebut di atas, beberapa penghargaan yang diperoleh Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo seperti : Satya Lencana Wira Karya Bidang Pertanian tahun 2010, Peningkatan Produksi Beras Nasional(P2BN) tahun 2010, Penghargaan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan tahun 2009, Penghargaan sebagai Pembina PNPM Pedesaan Terbaik tahun 2011, Pin Caping Emas tahun 2011, Penghargaan sebagai Bapak Pertanian Jawa Tengah tahun 2009,dsb (ada 46 penghargaan nasional dan 1 penghargaan internasional ICITAP), menunjukkan bahwa implementasi Bali Ndeso Mbangun Deso telah membawa hasil positif yang diakui baik oleh pemerintah maupun pihak swasta.

Data – data yang diperoleh di lapangan dikaitkan dengan prinsip manajemen menunjukkan bahwa gerakan moral Bali Ndeso Mbangun Deso sudah menerapkan prinsip manajemen secara baik. Hal ini dapat kita lihat pada :

1. Planning/perencanaan dilakukan melalui tahapan – tahapan implementasi kebijakan. Tahap perencanaan dilakukan pada tahap I yaitu Tahap Konsolidasi dan Persiapan (2008-2009). Pada tahap ini dilakukan juga pengorganisasian/*organizing* program.
2. Tahap II yaitu Tahap Percepatan Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemanfaatan Sumberdaya secara Lestari, dan Pelayanan Prima dalam *E-Government* (2010-2011), merupakan tahap pelaksanaan/*actuating* di lapangan sekaligus juga merupakan tahap evaluasi/*evaluating* dan *controlling*.
3. Tahap III yaitu Tahap Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Berkemampuan dan Berdayasaing Tinggi (2012-2013) merupakan tahap *actuating*, *evaluating*, dan *controlling*.

B.3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan Jawa Tengah.

Setelah membahas kontribusi dari program Bali Ndeso Mbangun Deso terhadap Ketahanan Pangan di Jawa Tengah, selanjutnya akan penulis uraikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan Jawa Tengah. Dari hasil penelitian diperoleh data mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi ketahanan pangan Jawa Tengah yaitu :

1. Laju alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian 2.000 ha/tahun.
2. Infrastruktur belum memadai baik dalam kuantitas maupun kualitasnya (kemudahannya).
3. Pada aspek konsumsi, pola konsumsi masyarakat masih didominasi pangan beras dan belum adanya upaya penggalian dan pemanfaatan sumber-sumber pangan karbohidrat lain.
4. Beberapa dekade belakangan ini masyarakat mulai mengkonsumsi secara lebih signifikan makanan yang berasal dari terigu berupa kue, roti, mie, mie instan, dll yang bahan bakunya berupa gandum dan belum mampu ditanam di Indonesia, sehingga masih harus impor yang berarti dapat mengurangi ketahanan nasional
5. Masih ada beberapa daerah yang mengalami kerawanan pangan baik kronis akibat kondisi yang marginal, miskin struktural maupun kerawanan pangan transien akibat bencana alam .
6. Luas Jawa Tengah yang mencapai 32.544,12 km² dan topografi berbukit dan lembah menyebabkan distribusi pangan kurang lancar.
7. Masih dijumpai beberapa desa tidak dapat dilalui kendaraan roda empat menyebabkan tersendatnya distribusi pangan. (Renstra BKP 2009-2013).

Selain hal tersebut di atas, faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan Jawa Tengah dilihat dari empat aspek ketahanan pangan adalah sebagai berikut :

1. Aspek Ketersediaan Pangan:

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya menjamin ketersediaan pangan antara lain: (a) Laju peningkatan kebutuhan beberapa komoditas pangan lebih cepat dari

laju peningkatan produksi; (b) Konversi lahan pertanian subur beririgasi terus berlanjut; (c) Kondisi infrasturture irigasi kurang memadai; (d) Banyaknya jumlah petani gurem (luas garapan < 0,5 ha); (e) Mahalnya harga pupuk di pasaran; (f) Terbatasnya fasilitas permodalan di pedesaan serta lembaga penjaminannya; (g) Lambatnya penerapan teknologi akibat kurangnya insentif ekonomi; (h) Rendahnya kemampuan mengelola cadangan pangan; dan (i) Anomali iklim dan menurunnya kualitas lingkungan.

2. Aspek Distribusi Pangan:

Adanya beberapa permasalahan strategis dalam aspek distribusi yang menyebabkan biaya distribusi pangan yang tinggi antara lain: (a) Terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan untuk menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah terpencil; (b) Keterbatasan sarana dan kelembagaan pasar; (c) Banyaknya pungutan resmi dan tidak resmi; dan (d) Tingginya biaya angkut.

3. Aspek Konsumsi Pangan:

Permasalahan dalam aspek konsumsi antara lain: (a) Besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran dengan kemampuan akses pangan rendah; (b) Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi pangan dan gizi; (c) Masih dominannya konsumsi sumber energi karbohidrat yang berasal dari beras; (d) Rendahnya kesadaran dan penerapan sistem sanitasi dan higienis rumah tangga; dan (e) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan.

4. Aspek Keamanan Pangan:

Permasalahan aspek keamanan pangan antara lain: (a) Masih adanya makanan olahan yg menggunakan bahan tambahan makanan (pewarna, pengawet) yang dilarang, seperti *Rhodamin B, Methyl Yellow, Formalin, Borax*, dll.; (b) Kurangnya penyuluhan dan pelatihan akan bahayanya penggunaan bahan tambahan makanan yang dilarang; (c) Belum adanya kepastian hukum terhadap pelaku bisnis pangan terhadap penggunaan bahan tambahan yang berbahaya dan dilarang. (Profil Gubernur Jawa Tengah, BKP Jateng 2011).

Untuk analisis berkaitan dengan faktor – faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan di Jawa Tengah, kelemahan manajemen lebih pada sisi *coordinating* dan *controlling*. Koordinasi masih lemah antara Badan Pertanahan dengan Dinas Tata Kota, sehingga masih terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Kurangnya kontrol dinas-dinas yang terkait dengan produksi pangan juga mengakibatkan masih adanya pelanggaran pemakaian zat-zat berbahaya pada makanan.

Dari hasil wawancara diperoleh keterangan beberapa hambatan yang dihadapi berkaitan dengan implementasi program Bali Ndeso Mbangun Deso sebagai berikut :

1. Ibu Sumirah kepala bidang dua Bapermas Provinsi Jawa Tengah:
2. Kendala penerapan konsep Bali Ndeso Mbangun Deso adalah ada pada ketidakharmonisan komunikasi antara pemerintah daerah dengan lembaga legislative daerah... sebenarnya konsep ini bagus dalam rangka penerapan pembangunan yang berdasarkan pada partisipasi masyarakat/pembangunan partisipatif, akan tetapi bila konsep ini dibawa ke ranah politik maka yang

- muncul kemudian adalah sisi negatifnya... (hasil wawancara Rabu 24 Agustus 2011, jam 11.10.WIB, kantor Bapermas Prov. Jateng).
3. Bapak M. Arif Sambodo Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
Kendala penerapan konsep Bali Ndeso Mbangun Deso ada dua, yaitu kendala cultural dan kendala dinamis. kendala cultural berkaitan dengan mind set penduduk pedesaan yang menganggap bahwa kehidupan di kota lebih menarik...kendala dinamis berkaitan dengan kedudukan sector pertanian dalam struktur yaitu merupakan sector musiman...(hasil wawancara kamis 25 Agustus 2011, jam 12.20. WIB, kantor Bappeda Prov.Jateng).
4. Bapak H. Soenarno, Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
Kendala penerapan program Bali Ndeso Mbangun Deso ada dua yaitu : pertama kendala kultur yaitu adanya perubahan kultur pola makan masyarakat akibat adanya liberalisasi pangan...generasi muda sekarang lebih suka makan roti atau mie yang bahan dasarnya dari terigu daripada makan lontong pecel...kedua kendala infrastruktur yaitu kondisi jalan-jalan pedesaan menuju setra produksi yang masih sulit dilalui...(hasil wawancara Rabu 15 September 2011, jam 8.45.WIB di kantor BKM Prov. Jateng).
- Hasil wawancara tersebut di atas, mencerminkan masih adanya keraguan atau pandangan miring terhadap program Bali Ndeso Mbangun Deso, juga memperlihatkan bahwa ada faktor penghambat yang cukup sulit untuk diatasi yaitu berkaitan dengan merubah mindset berpikir masyarakat desa dan juga masyarakat kota Jawa Tengah.

C. PENUTUP

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Gerakan moral Bali Ndeso Mbangun Deso yang kemudian diejawantahkan dalam visi pembangunan Jawa Tengah2008 – 2013 yaitu Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera, telah memberikan kontribusi positif bagi Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
2. Prinsip – prinsip manajemen telah dilaksanakan dalam mengimplementasikan gerakan moral Bali Ndeso Mbangun Deso.

Ada beberapa saran yang peneliti rekomendasikan khususnya untuk pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Dalam upaya menjamin ketersediaan pangan antara lain dapat dilakukan dengan menerapkan peraturan pembatasan alih fungsi lahan secara konsisten, mengkampayaken kembali secara massif program dua anak cukup, mengkampanyekan perlunya menjaga lingkungan hidup.
2. Untuk memperlancar distribusi pangan tidak ada pilihan lain kecuali memperbaiki sarana infrastruktur khususnya jalan- jalan yang menuju sentra produksi tanaman pangan.
3. Guna mengatasi kendala diaspek konsumsi pangan perlu digalakkan kampanye dan penyuluhan tentang keanekaragaman pangan sebagai sumber karbohidrat selain nasi. Kegiatan PKK dan Dharma Wanita dapat

- dijadikan sarana bagi penambahan pengetahuan masyarakat Jawa Tengah tentang perlunya variasi dalam makanan sehari-hari khususnya karbohidrat.
4. Masyarakat perlu diberiinformasi secara terus menerus mengenai bahaya bahan-bahan kimia bagi kesehatan tubuh. Balai Pengawasan Obat dan Makanan Daerah, perlu sering mengadakan sidak terhadap makanan yang dijual di masyarakat.

Saran secara umum adalah bahwa perlu kepemimpinan yang kuat terhadap pentingnya pangan dan pertanian sebagaimana dicontohkan oleh Gubernur Jawa Tengah Babit Waluyo. Pembangunan pertanian guna tercapainya ketahanan pangan tidak bisa tanpa aspek fundamental khususnya teknologi dan kepastian lahan, konsistensi kebijakan, dan dukungan infrastruktur.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber dari buku :

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Presss, Yogyakarta.
- Miles & Huberman. 1984. *Qualitative Data Analysis; A Sourcebook of New Methods*, Sage Publications, Beverly Hills, London.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho, Riant D. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Steers, Richard. 1985, *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- The Liang Gie. 1982. *Administrasi Perkantoran Modern*, Nur Cahaya, Yogyakarta.
- Gullick, Luther M. 1937. *The Theory of Administration*, New York: Institute of Public Administration.
- Koontz, Harold and O'Donnell 1968. *Principles of Management, An Analysis of Management Function*, New York: Mc Graw Hill Book Company.
- Millet, John D. 1954. *Management in the Public Services*, New York: Mc Graw Hill Book Company.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernetology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sarwoto. 1977. *Dasar – dasar Organisasi Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Sumber dari internet :

- http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/Anjak_2005_IV_15.pdf diakses Kamis 28 april 2011 jam 13.29 WIB.
- <http://www.antaranews.com/berita/1268520045/jateng-surplus-2-5-juta-ton-gkg>
diunduh Kamis 28 April 2011 jam 13.14 WIB.
- http://obyektif.com/infojateng/read/dipertanyakan_bali_desobangun_deso/
diakses Kamis 28 April 2011 jam 12.50 WIB.
- Achmad Suryana:Ketahanan Pangan dalam :
http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/Anjak_2005_IV_15.pdf diakses Kamis 28 april 2011 jam 13.29 WIB.
- <http://bkp.jatengprov.go.id/index.php?action= home.main> diakses Kamis 28 April 2011 jam 13.23 WIB.

Sumber dari Surat Kabar:

Kompas, 6 Mei 2011.